

## **BAB V**

### **KESIMPULAN**

Jepang merupakan salah satu negara maju yang terletak di kawasan Asia Timur, yang saat ini tercatat sebagai negara penyandang predikat kekuatan ekonomi di Regional Asia. Namun sebelum itu, Jepang sangat terkenal akan politik isolasinya. Selama kurang lebih 250 tahun kekuasaan Shogunat Tokugawa mengisolasi interaksinya dengan bangsa-bangsa lain. Hanya kepulauan Okinawa pada saat itu yang mendapat izin melakukan interaksi dengan dunia luar, namun dengan akses yang masih dibatasi oleh Tokugawa. Selama berjalannya sistem isolasionis, masyarakat Jepang dilarang melakukan perjalanan ke Luar Negeri dan melakukan hubungan dagang dengan negara luar, karena banyak hal yang muncul dan dinilai bertolak belakang dengan feodal yang dianut rakyat Jepang pada saat itu. Lambat laun, politik isolasi yang diterapkan oleh negara Jepang tidak dapat dipertahankan lagi keberadaannya. Hal tersebut disebabkan oleh beberapa faktor, salah satunya muncul berbagai teknologi baru oleh negara-negara Barat, dan datangnya Komodor Perry pelaut Amerika Serikat dan Townsen Haris yang memaksa Tokugawa untuk menandatangani sebuah perjanjian. Kejadian itu menuai kekhawatiran para bangsa Jepang, jika suatu saat nanti Jepang dapat dikuasai oleh bangsa-bangsa Barat, hal itu yang kemudian digunakan oleh beberapa daimyo yang berani melawan kekuasaan Tokugawa untuk menjatuhkannya.

Dengan Jatuhnya kekuasaan Tokugawa, pada 1868 muncullah sebuah gerakan perubahan yang disebut dengan Restorasi Meiji. Dalam Restorasi Meiji, banyak sekali perubahan yang dialami oleh negeri Sakura tersebut. Pada saat itu, terdapat berbagai budaya asing yang mulai masuk ke Jepang, seperti *westernisasi* yang merupakan pengadopsian dari budaya-budaya Barat. Pada saat berlangsungnya Meiji,

Jepang bersemboyan pada “*Fukoku Kyohei*” yang berarti negara sejahtera dan memiliki tentara kuat, dengan begitu Jepang mulai percaya pada kekuatan sendiri. Restorasi Meiji berdampak pula pada hubungan luar negeri Jepang, bawasannya Jepang yang semula adalah negara isolasi, menjadi negara yang *Open Door Policy*, hingga terdapat pula suatu perkembangan ekonomi yang dirintis Jepang pada sektor industrinya.

Namun perkembangan ekonomi Jepang berubah kembali ketika kekalahannya pada Perang Dunia II. Berakhirnya Perang Dunia II, mengakibatkan banyak sekali kerusakan terhadap infrastruktur dan perumahan di Jepang sehingga merekapun kehilangan beberapa Asset yang dimiliki. Jepang terpaksa harus tunduk pada negara yang berkuasa yaitu Amerika Serikat, selain itu Jepang juga harus melakukan reparasi perang, dimana Jepang dapat membangun negaranya yang runtuh hanya dengan mengembangkan perekonomian tanpa harus menggunakan kekuatan militer. Pengembangan ekonomi Jepang pun tertuju pada penguatan sektor industrialisasi yang ia miliki. Namun Jepang masih berambisi mencari berbagai alternative untuk dapat menambah pemasukan ekonomi domestik disamping sektor industri. Hingga tercetus suatu ekonomi kreatif dalam sektor pariwisata, kemudian Jepang mulai memperbaiki sarana umum domestiknya. Disamping itu, terdapat dua doktrin dalam kebijakan luar negeri Jepang. Yaitu Yoshida Doktrin, (yang menerapkan kebijakan luar negeri Jepang dengan mengarah pada diplomasi ekonomi), dan Fukuda Doktrine, (membahas mengenai orientasi ekonomi Jepang yang condong ke Asia Tenggara salah satunya Indonesia).

Pengembangan ekonomi kreatif pada sektor pariwisata yang mulai dirintis oleh Jepang, terdapat tiga tahapan yang dilalui yaitu penekanan Pemerintah Jepang untuk para penduduknya yang diharuskan melakukan perjalanan wisata domestik. Pada saat itu, promosi yang

dijalankan Jepang adalah wisata edukasi yang ditujukan pada para siswa sekolah Jepang. Sekolah-sekolah tersebut diwajibkan untuk satu tahun sekali melakukan perjalanan wisata ke tempat-tempat bersejarah di sana, dengan begitu sektor pariwisata Jepang pun mulai terasa perkembangannya. Jepang sendiri pada saat itu mulai memperbaiki sarana umum yang ada dinegaranya, seperti alat transportasi, dan hotel. Dengan adanya perbaikan sarana umum, terdapat beberapa warga negara asing yang mulai tertarik untuk mengunjungi Jepang. Tercatat sebanyak 352.832 orang asing yang datang pada tahun 1964, lalu bertambah lagi menjadi 1.316.632 orang pada tahun 1980, hingga pada tahun 1990 menjadi 3.235.860 warga negara asing. Meski adanya pertambahan jumlah kunjungan, namun pada tahun 1980 hingga 1990, Negeri Sakura ini tercatat sebagai negara yang hanya aktif dalam menyumbangkan angka wisatawan ke negara lain saja dan masih menerapkan *Outbound Tourism*. Namun keadaan tersebut berubah kembali saat Perdana Menteri Jepang, Koizumi menerapkan beberapa kebijakan untuk mempermudah para warga negara asing yang ingin berkunjung ke Jepang pada 2002, hingga keadaan pariwisata Jepang mulai menjadi *Inbound Tourism*.

Terdapatnya doktrin Fukuda yang mengarah pada orientasi ekonomi di Asia Tenggara, pada tahun 1958, menjadikan sebuah hal baru untuk Indonesia dan Jepang, yang mana pada tahun itu terjalinlah hubungan bilateral antar kedua negara, dan terdapat adanya penanda tangan perjanjian pampasan perang. Hubungan bilateral yang terjalin antara Jepang dengan Indonesia terjadi sangat dinamis yang mengakibatkan hubungan keduanya sampai pada tahap Mitera Setrategis. Hubungan Jepang dengan Indonesia pada sektor ekonomi menitik beratkan pada investasi, perdagangan, dan kerjasama bantuan ekonomi (ODA). Tidak hanya pada kerja sama ekonomi saja, hubungan Jepang dengan Indonesia pun

berkembang hingga pada sektor pariwisata. Sektor pariwisata menarik untuk diulas karena latar belakang Jepang yang merupakan negara dengan sistem tertutupnya, hingga kemudian mulai membuka diri pada negara-negara luar. Kerjasama Jepang dan Indonesia dalam sektor pariwisata tersebut terjalin pada tahun 2003, ketika Presiden Republik Indonesia, Ibu Megawati Soekarno Puteri menandatangani perjanjian kerjasama tersebut di Jepang. Setelah adanya kerjasama antar kedua negara dalam sektor pariwisata, Jepang pun memberikan beberapa kebijakan yang mempermudah warga negara Indonesia yang ingin melakukan perjalanan ke Jepang, mulai dari *Multiple Visa* hingga kebijakan bebas visa.

Ketika pengembangan sebuah sektor pariwisata, tidak dapat terlepas dari yang namanya Visa. Karena visa merupakan salah satu syarat utama untuk melakukan sebuah perjalanan ke luar negeri. Jepang sendiri, dalam memberlakukan kebijakan visa dinegaranya memiliki sebuah prosedur yang sangat panjang, hal tersebut merupakan salah satu upaya untuk mencegah perdagangan manusia dan masuknya teroris. Namun stagnasi yang dialami Jepang selama kurang lebih 20 tahun, mengakibatkan tercetus sebuah kebijakan yang diinisiasi oleh Perdana Menteri Shinzo Abe II, dalam pengembangan sektor pariwisatanya melalui kebijakan *Abenomic Growth Strategy*. Dalam kebijakan tersebut terdapat beberapa kebijakan lain mengenai pengembangan sektor pariwisata Jepang. Hingga memunculkan sebuah kebijakan bebas visa untuk beberapa negara termasuk Indonesia pada tahun 2014 dengan syarat *E-Passport* dan hanya untuk tujuan wisata.

Kepentingan Rasional negara Jepang merupakan salah satu alasan yang melatar belakangi pemberian kebijakan bebas visa terhadap beberapa negara terkhusus Indonesia. Dengan kebijakan bebas visa yang diberikan oleh Jepang,

dapat terealisasikan beberapa kepentingan rasionalnya dalam mengoptimalkan hasil, seperti bertambahnya warga negara asing yang berkunjung ke Jepang. Yangmana, Jepang berambisi untuk meraih 20 juta warga negara asing yang berkunjung ke negaranya pada tahun 2020, namun sebelum tahun 2020, tepatnya pada tahun 2016 Jepang telah mencapai target yang diinginkan, bahkan hasilnya dapat melampaui, hingga sebesar 24.039.700 juta. Terdapat perbedaan yang signifikan pula terhadap jumlah kunjungan warga negara Indonesia sebelum hingga sesudah kebijakan bebas visa diberlakukan. Sebelum bebas visa, tercatat 136.797 orang yang berkunjung, namun setelah diberlakukan kebijakan bebas visa pertambahan wisatawan asing yang berkunjung ke Jepang mencapai hingga 271,014 orang pada tahun 2016. Kepentingan aktor Rasional Jepang selanjutnya adalah adanya pertambahan pendapatan melalui warga negara asing yang berkunjung, untuk pertambahan pendapatan GDP Jepang, meski sektor pariwisata hanya menyumbangkan 2,4% dari GDP, namun hasil tersebut juga berperan dalam menambah pendapatan ekonomi domestik Jepang yang mencapai hingga ¥ 12,013 miliar pada tahun 2016. Warga negara Indonesia pun ikut andil dalam sektor pariwisata Jepang dalam membelanjakan uangnya hingga mencapai ¥ 37 miliar tercatat pada tahun 2016. Dalam pertambahan sektor ekonomi Jepang, terdapat pula peningkatan investasi yang dilakukan negara Jepang di Indonesia pada sektor pertanian melalui bidang pembuatan teknologi irigasi. Selain dua kepentingan rasional Jepang diatas, alasan lain pemberlakuan bebas visa untuk Indonesia, juga untuk merekatkan hubungan bilateral antar kedua negara. Dengan Jepang yang memulai untuk memberlakukan kebijakan bebas visa tersebut untuk Indonesia tahun 2014. Kemudian pada Juni 2015, Pemerintah Indonesia pun merespon dengan baik hingga memberlakukan kebijakan yang sama untuk warga negara Jepang yang ingin berkunjung

ke Indonesia tanpa harus mengaplikasikan visa dengan tujuan singkat dan tidak boleh lebih dari 30 hari tinggal.

Dengan adanya penelitian ini, penulis menyimpulkan bahwa skripsi ini mengkaji tentang diplomasi dan kepentingan dari aktor Rasional Negara Jepang dalam memberlakukan kebijakan bebas visa kepada warga negara Indonesia untuk mencapai suatu tujuan. Hal tersebut dibuktikan pada pemaparan bab IV mengenai alasan apa saja yang melatar belakangi Pemerintah Jepang dalam menerapkan kebijakan bebas visa tersebut. Dengan begitu, penelitian dengan Judul “Kebijakan *Exemption of Visa* oleh Jepang Terhadap Indonesia pada Era Shinzo Abe II” ini telah selesai. Namun setelah dilihat dari prespektif Jepang, penelitian ini dapat dikembangkan lagi misalnya jika dilihat dari prespektif negara Indonesia, sebagai negara penerima kebijakan tersebut. Bagaimanakah Respon Pemerintah Indonesia atas diberlakukannya kebijakan bebas visa oleh Jepang, dan apa dampak dari kebijakan bebas visa tersebut untuk perekonomian negara Indonesia.